



**RENCANA KERJA (RENJA)
BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

2024

KATA PENGANTAR

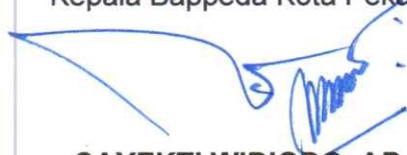
Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Alhamdulillah dengan rahmatNya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan Tahun 2025 telah berhasil disusun. Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda 2021-2026, dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Renja ini, secara rinci telah ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Pekalongan pada tahun 2025. Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta pagu anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan dapat tercapai dengan optimal.

Pekalongan, 1 Agustus 2024

Kepala Bappeda Kota Pekalongan



CAYEKTI WIDIGDO, AP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19750729 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	ivv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	42
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46
3.3 Program dan Kegiatan	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	56
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Catatan Penting.....	61
5.2 Kaidah Pelaksanaan	61
5.3 Rencana Tindak lanjut	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023 Target Dan Proyeksi Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	24
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pekalongan	28
Tabel 2.4	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.....	44
Tabel 3.1	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional	44
Tabel 3.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	47
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026	48
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.....	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan proses strategis dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokal guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan ini ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan publik dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Daya saing daerah dan indeks pembangunan manusia menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah, sebagai landasan dari seluruh aktivitas pembangunan, memiliki peran sentral dalam memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, perencanaan pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dalam merancang tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan pembangunan yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana sebagai tindaklanjutnya, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan peluang otonomi seluas-luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini merupakan peluang untuk memberikan kemajuan pembangunan dengan ciri khas dan potensi daerah dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut. Salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah terbagi dalam tiga fase, yakni Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan draft awal sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah pada tahun n.

- b. Selanjutnya rancangan awal renja disempurnakan berdasarkan surat edaran Wali Kota Pekalongan menjadi rancangan renja. Rancangan renja dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah dan sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang tingkat kota.
- c. Hasil musrenbang menjadi dasar penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD. Selanjutnya Peraturan Walikota tentang RKPD menjadi dasar dalam menyempurnakan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- d. Rancangan Akhir Renja seluruh Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Renja Perangkat Daerah.

Seluruh tahapan proses merupakan implementasi perencanaan secara partisipatif dengan pendekatan teknokratik, *bottom up*, *top down*, dan *politis*.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keunagan daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kota Pekalongan;
20. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Dokumen Renja BAPPEDA Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi BAPPEDA Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Dokumen Renja BAPPEDA Kota Pekalongan disusun bertujuan antara lain untuk:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan BAPPEDA Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja BAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang.

Memuat tentang pengertian Renja Bappeda, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra).

1.2 Landasan Hukum.

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Bappeda Kota Pekalongan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Bappeda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Selaian itu, juga untuk dapat diketahui dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasannya. Kemudian menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Renja, seperti terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya anggaran berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain : Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda.

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Pekalongan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 Bappeda Kota Pekalongan sebesar Rp. 7.641.959.000,-, termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dengan melaksanakan 2 penunjang urusan pemerintahan, 4 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 7.261.284.832,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 95,02%.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024, dengan alokasi pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 7.591.490.000,- (belanja gaji dan tunjangan 4.890.512,-) melaksanakan 2 unsur penunjang urusan pemerintahan, 4 program, 16 kegiatan dan 35 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda sebagai berikut:

1. Keterbatasan akses terhadap data dan informasi yang relevan dalam proses perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
2. Mengingat perubahan struktur kelembagaan yang signifikan pasca penghapusan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), indikator yang digunakan untuk menghitung nilai RIDA tidak dapat dihitung;
3. Koordinasi antar *stake holder* perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang tidak maksimal menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
4. Komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD perlu ditingkatkan dalam merencanakan

kegiatan.

5. Manajemen risiko yang disusun pada akhir tahun dimana proses perencanaan penganggaran sudah sampai pada tahap RAPBD sehingga belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga potensi risiko belum dikelola secara proaktif dan reaktif.
6. Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah bahwa hanya terdapat satu indikator dalam satu sub kegiatan sehingga perlu sinkronisasi dengan target kinerja pada periode sebelumnya.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 pada Bappeda Kota Pekalongan dari 2 urusan yaitu urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan yang dilaksanakan dengan 4 program,

Adapun evaluasi kinerja hasil/ keluaran program/kegiatan/ subkegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Pada pelaksanaan Renja Bappeda Kota Pekalongan tahun 2023 seluruh program memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang diharapkan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Pada Renja Bappeda Kota Pekalongan tahun 2023 terdapat 12 indikator dengan kategori memenuhi target ketercapaian pada indikator program sebanyak 11 indikator program.
Namun demikian terdapat 1 indikator yang dalam penilaian ketercapaiannya tidak sesuai dengan devinisi awal penyusunan target yaitu skor capaian nilai Rida pada program penelitian dan pengembangan daerah. Hal yang mendasarinya adalah perubahan signifikan dalam tata kelola riset dan inovasi pasca pembubaran BRIN, indikator yang digunakan untuk menghitung nilai RIDA perlu dievaluasi ulang dan disesuaikan. Pada indikator kegiatan terdapat 15 indikator kegiatan dengan kategori memenuhi target dalam ketercapaian indikator kegiatan sebanyak 15 indikator.
Sedangkan pada indikator sub kegiatan terdapat 57 indikator yang kesemua indikator sub kegiatan tersebut memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Pada Renja tahun 2023 terdapat 1 sub kegiatan yang melebihi target capaian kinerja yaitu sub kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah sebanyak 400 orang/ kali terealisasi sebanyak 407 orang/ kali atau sebesar 101%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
Indikator program/kegiatan/sub kegiatan tidak tercapai targetnya
Terdapat satu indikator program yang tidak sesuai pencapaian dalam target kerjanya

yaitu program pengembangan penelitian daerah dengan indikator skor capaian nilai Rida sebesar 73. Hal ini disebabkan karena pasca reorganisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional telah menyebabkan ketidaksesuaian indikator yang digunakan untuk mengukur nilai Riset dan Inovasi Daerah (RIDA). Indikator seperti jumlah publikasi ilmiah internasional dan jumlah paten yang diperoleh, yang sebelumnya dianggap penting, mungkin tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kinerja riset dan inovasi daerah dalam konteks saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendefinisian ulang indikator yang mencakup aspek-aspek seperti inovasi sosial, komersialisasi hasil riset, dan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah

Adapun faktor-faktor melebihi target kinerja pada kegiatan, disebabkan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, sehingga dengan jumlah anggaran yang direncanakan dapat meningkatkan kinerja yang ditentukan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang membatasi jumlah indikator pada setiap subkegiatan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator dapat mengukur kinerja subkegiatan secara spesifik dan tidak terjadi duplikasi dengan indikator lainnya. Sehingga dalam penghitungan realisasi kinerja pada periode akhir renstra dapat secara akurat tersajikan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan yang sudah dilakukan mapping berdasarkan permendagri 90 tahun 2019, didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini :

**Tabel 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KOTA PEKALONGAN**

OPD : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Kode	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD (%)	Status Capaian	
					Target 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	URUSAN PENUNJANG									
5.01	PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan ketercapaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
		persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Yang Disusun	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	6 dokumen	60	Belum Tercapai
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan Yang Disusun	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	6 dokumen	60	Belum Tercapai
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	36 bl	60	Belum Tercapai
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	12 bl	60	Belum Tercapai

Kode	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD (%)	Status Capaian	
					Target 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Jumlah dokumen SAKIP yang Disusun (penetapan dan perubahan)	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	6 dokumen	60	Belum Tercapai
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	25 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	15 dokumen	60	Belum Tercapai
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gajidan TunjanganASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	36 bl	60	Belum Tercapai
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	36 bl	60	Belum Tercapai
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	60	Belum Tercapai
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik	15 kali	3 kali	1 kali	1 kali	100%	5 kali	33	Belum Tercapai
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	36 bl	60	Belum Tercapai
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda-benda pos	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	36 bl	60	Belum Tercapai
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	15 unit	3 unit	6 unit	6 unit	100%	16 unit	107	Tercapai

Kode	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD (%)	Status Capaian
					Target 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah sarpras pendukung yang diadakan dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (bankeu)	-		20 unit	20 unit	100%			
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	36 bl	60	Belum Tercapai
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55 bl	11 bulan	11 bl	11 bl	100%	33 bl	60	Belum Tercapai
5.01.01.2.06.05	Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	36 bl	60	Belum Tercapai
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	36 bl	60	Belum Tercapai
5.01.01.2.06.09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	547 org/kali	115 orang/kali	407 org/kali	400 org/kali	101%	854 org/ kali	156	Tercapai
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
	Penyediaan JasaSurat Menyurat	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	36 bl	60	Belum Tercapai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	36 bl	60	Belum Tercapai
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	36 bl	60	Belum Tercapai
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	75 unit	17 unit	14 unit	14 unit	100%	43 unit	57	Belum Tercapai

Kode	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD (%)	Status Capaian	
					Target 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah bulan kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	-	12 bl	12 bl	100%				
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	36 bl	60	Belum Tercapai
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
		Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	200	Tercapai
		Jumlah dokumen RKPD yang disusun	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	9 dokumen	60	Belum Tercapai
		Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia yang dilaksanakan (bankeu)	-		1 kali	1 kali	100%	1 kali	100	Tercapai
		Jumlah pertemuan Asosiasi Kepala Bappeda se-Jawa Tengah yang dilaksanakan (bankeu)	-		1 kali	1 kali	100%	1 kali	100	Tercapai

Kode	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD (%)	Status Capaian	
					Target 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun (SIDa)	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	50	Belum Tercapai
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	12 dokumen	60	Belum Tercapai
		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	12 dokumen	60	Belum Tercapai
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan Bidang Pemsosbud	100%	100%	1%	100%	100%	100%	100	Tercapai
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
		Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai

Kode	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD (%)	Status Capaian
					Target 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	100	Tercapai
		Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	10 kali	1 kali	1 kali	100%	3 kali	30	Belum Tercapai
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan Bidang pemerintahan yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	60	Belum Tercapai
		Jumlah dokumen LP2KD yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	20	Belum Tercapai
		Jumlah dokume RAT Penanggulangan Kemiskinan yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	20	Belum Tercapai
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	60	Belum Tercapai
		Jumlah dokumen pelaksanaan Penanggulangan masalah gizi yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	-	-			
		Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia	5 kali	1 dokumen	1 kali	100%	2 dokumen	40	Belum Tercapai
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Anggaran Responsif Anak (ARA) Kota Pekalongan	5 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	20	Belum Tercapai

Kode	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD (%)	Status Capaian	
					Target 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	60	Belum Tercapai
		Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun	2 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	50	Belum Tercapai
		Jumlah dokumen Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Pekalongan yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	20	Belum Tercapai
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kegiatan Fasilitas dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100%		100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pendukung pengembangan Teknopark	3 dokumen		-	-	-			
		Jumlah dokumen Kajian Pengembangan Kota Pekalongan dengan Penekanan pada Pengembangan Sektor Perikanan	-		-	-	-	1 dokumen	100	Tercapai
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	-	-	-	2 dokumen	40	Belum Tercapai
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan sektor SDA yang disusun	-		1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	100	Tercapai
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
5.01.03.2.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Dokumen Revisi Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang disusun	-		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100	Tercapai

Kode	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD (%)	Status Capaian	
					Target 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
		Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Infrastruktur yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	60	Belum Tercapai
		Jumlah dokumen kajian Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Onshore yang disusun	-		-	-				
		Jumlah dokumen model peremajaan/revitalisasi kawasan kumuh yang disusun	-	1 dokumen	-	-		1 dokumen	100	Tercapai
5.01.03.2.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen evaluasi implementasi Perda RTRW 2009-2029 yang disusun	-		-	-		1 dokumen	100	Tercapai
		Jumlah dokumen koordinasi pengembangan wilayah yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	60	Belum Tercapai
		Jumlah dokumen revisi masterplan smart city yang disusun	-		-	-		1 dokumen	100	Tercapai
		Jumlah laporan evaluasi smart city yang disusun	5 dokumen		-	-		2 dokumen	40	Belum Tercapai
		Jumlah dokumen/laporan koordinasi penataan ruang yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	-	-				
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.02	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
		Skor Capaian Nilai RIDA (SIDA)	72	70,93	73	73	100%	73	101	Tercapai

Kode	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD (%)	Status Capaian	
					Target 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai	
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan oleh peneliti dan/atau lembaga penelitian yang difasilitasi	30 riset	6 riset	5 riset	5 riset	100%	15 riset	50	Belum Tercapai
		Jumlah penelitian dan pengembangan bidang otonomi daerah yang dilaksanakan	5 riset		5 riset	5 riset	100%	10 riset	200	Tercapai
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah jurnal litbang yang diterbitkan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	60	Belum Tercapai
		Jumlah website kelitbangan yang dikelola	2 website		1 website	1 website	100%	1 website	50	Belum Tercapai
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah FGD/workshop/Rakor kelitbangan yang dilaksanakan (SIDa)	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	9 kali	60	Belum Tercapai
		Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan (SIDa)	5 kali	2 dokumen	2 kali	2 kali	100%	4 kali	80	Belum Tercapai
		Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan (SIDa)	20 kali	4 kali	3 kali	3 kali	100%	11 kali	55	Belum Tercapai
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaksanaan pengembangan Inovasi dan teknologi (SIDa)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Koordinasi dan evaluasi Sida	4 kali	1 kali	4 kali	4 kali	100%	12 kali	300	Tercapai

Kode	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD (%)	Status Capaian	
					Target 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi tingkat regional	5 event	1 event	1 kali	1 kali	100%	2 kali	40	Belum Tercapai	
	Jumlah pelaksanaan Pameran Inovasi	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	2 kali	40	Belum Tercapai	
	Jumlah Pemenang Krenova	20 pemenang	5 pemenang	5 pemenang	5 pemenang	100%	15 pemenang	75	Belum Tercapai	
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Sosialisasi HKI yang dilaksanakan (SIDa)	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	2 kali	200	Tercapai

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan.

1. Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan adalah:

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- 2) perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 3) perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
- 4) pengoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan dari Perangkat Daerah Provinsi dan/atau instansi Pemerintah Pusat;
- 5) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan;
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan;
- 7) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- 8) pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 9) pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
- 10) pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
 - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - f. Bidang penelitian dan pengembangan
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Kondisi Sumber Daya Manusia
- Jumlah pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan, sampai dengan Juli 2024 berjumlah 33 orang.
- a. Jumlah pegawai BAPPEDA berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dari pegawai yang berstatus PNS adalah sebagai berikut:
 - 1) 9 (sembilan) orang berpendidikan S 2;
 - 2) 19 (sembilan belas) orang berpendidikan S 1/D IV;
 - 3) 3 (tiga) orang berpendidikan D III;
 - 4) 2 (dua) orang berpendidikan setingkat SMA.
 - b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktural

a) Eselon II.b	:	1 orang
b) Eselon III.a	:	1 orang
c) Eselon III.b	:	4 orang
d) Eselon IV.a	:	2 orang
 - 2) Pejabat Fungsional : 14 orang
 - 3) Staf : 11 orang
 - c. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/Golongan adalah sebagai berikut:

1) Pembina Utama Muda (IV/c)	:	2 orang
2) Pembina Tk.I (IV/b)	:	2 orang
3) Pembina (IV/a)	:	5 orang
4) Penata Tingkat I (III/d)	:	3 orang
5) Penata (III/c)	:	2 orang
6) Penata Muda Tk. I (III/b)	:	5 orang
7) Penata Muda (III/a)	:	9 orang
8) Pengatur (II/c)	:	3 orang
9) Pengatur Muda (II/a)	:	1 orang
10) PPPK/ Gol IX	:	1 orang
4. Kondisi Sarana dan Prasarana
- Sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, BAPPEDA Kota Pekalongan memiliki sarana prasarana adalah:
- | | | |
|------------------|---|---------|
| a. Mobil Dinas | : | 3 unit |
| b. Motor Dinas | : | 13 unit |
| c. PC. Unit | : | 11 unit |
| d. Laptop/laptop | : | 41 unit |
| e. LCD | : | 5 unit |

f. Drone	:	1 unit
g. Voice recorder	:	2 unit
h. GPS Garmin	:	1 buah
i. Camera	:	5 buah
j. AC	:	17 unit
k. Ruang Kerja	:	13 ruang
l. Ruang Rapat	:	2 ruang
m. Gudang	:	1 ruang

Sarana prasana untuk Sekretariat pada BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Meja kerja	:	6 buah
b. Meja rapat	:	2 buah
c. Kursi rapat	:	24 buah
d. Lemari	:	3 buah
e. Kursi kerja	:	8 buah
f. Filling cabinet	:	4 unit
g. Kipas angin	:	1 unit
h. Televisi	:	2 unit
i. Printer/scener	:	7 unit
j. Mesin ketik	:	1 unit

Sarana prasana untuk Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Meja kerja	:	9 buah
b. Meja rapat	:	1 buah
c. Kursi kerja	:	10 buah
d. Kursi rapat	:	6 buah
e. Televisi	:	1 unit
f. Lemari	:	5 buah
g. Filling cabinet	:	5 buah
h. Printer scener	:	5 buah

Sarana prasarana di Ruang Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Meja kerja	:	5 buah
b. Meja rapat	:	1 buah
c. Kursi kerja	:	5 buah
d. Kursi rapat	:	4 buah
e. Televisi	:	1 unit
f. Lemari	:	4 buah
g. Filling cabinet	:	2 buah
h. Printer	:	5 buah

Sarana prasarana di Bidang Perekonomian, sumberdaya alam, infrastruktur dan kewilayahan BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Meja rapat	:	1 buah
b. Kursi rapat	:	7 buah
c. Televisi	:	1 unit
d. Meja kerja	:	9 buah
e. Lemari	:	7 buah
f. Kursi kerja	:	7 buah
g. Filling cabinet	:	14 buah
h. Printer/scener	:	4 buah

Sarana prasarana di Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Meja rapat	:	1 buah
b. Meja kerja	:	10 buah
c. Kursi kerja	:	10 buah
d. Kursi rapat	:	6 buah
e. Televisi	:	1 unit
f. Lemari	:	6 buah
g. Filling cabinet	:	2 buah
h. Printer/scemer	:	3 buah

5. Permasalahan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat, tetapi hanya sebagian saja usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini. Proses perencanaan yang diawali dari Musrenbangkel pada umumnya bersifat agenda tahunan dengan stakeholder yang bersifat sama. Diperlukan wadah atau sistem yang mengakomodir permasalahan pembangunan yang menyeluruh yang menampung permasalahan secara akumulasi selama 1 tahun sehingga perencanaan pembangunan dapat menampung permasalahan dan solusi secara luas.

Menurut Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021, Bappeda merupakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan perwal tersebut, Bappeda mengampu 2 (dua) urusan yaitu urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan.

Pada Tahun 2025, Bappeda melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan yaitu urusan perencanaan pembanguann dan urusan penelitian dan pengembangan, 4 program, 15 kegiatan dan 34 subkegiatan dengan capaian indikator sasaran sebagai berikut :

a) Nilai SAKIP OPD

Penilaian didasarkan atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang meliputi laporan kinerja instansi pemerintah, rencana aksi, perjanjian kinerja dan capaian kinerja OPD pada tingkat kota, provinsi maupun nasional. Nilai SAKIP Bappeda Kota Pekalongan pada periode evaluasi tahun 2023 adalah 88.50 dengan predikat A (Memuaskan) dari darget yang ditetapkan sebesar 89.00.

b) Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD

Uraian sasaran meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dengan indikator persentase program RKPD selaras dengan RPJMD dengan ketercapaian indikator sebesar 100% hal ini didukung oleh ketercapaian jumlah Program RKPD Tahun 2024 sesuai RPJMD sebanyak 125 dan jumlah Program RPJMD yg direncanakan untuk tahun 2023 sebanyak 125.

c) Persentase laporan hasil litbang

Pada uraian sasaran meningkatnya rekomendasi hasil Litbang dengan indikator Persentase laporan hasil litbang pada tahun 2023 realisasi capaian indikator tersebut sebesar 100%. Pencapaian tersebut didukung oleh terlaksananya laporan Riset Unggulan Daerah sebanyak 5 dokumen, laporan Riset Bersama sebanyak 2 dokumen dan jumlah laporan hasil penelitian sebanyak 7 dokumen.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah ini :

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023
Target Dan Proyeksi Tahun 2024 dan Tahun 2025**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan dan penelitian pengembangan									
1	Nilai SAKIP OPD			88	89	90	88,50	90	91	indeks
2	Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD			100	100	100	100	100	100	persen
3	Persentase laporan hasil litbang			100	100	100	100	100	100	persen

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kewajiban daerah di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan penelitian dan pengembangan daerah menghadapi beberapa tantangan mengenai kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan dinamika persoalan yang lain yang ditemui dalam penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan permasalahan umum yang ada dalam penyusunan perencanaan di bidang perencanaan pembangunan secara singkat diuraikan sebagai berikut:

1. Desentralisasi pemerintahan dan pembangunan

Desentralisasi yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara aktif merupakan langkah strategis dalam pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam pengelolaan pembangunan. Akan tetapi, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dapat berimplikasi pada ketimpangan distribusi pembangunan dan memicu ego sektoral yang berpotensi menghambat pemanfaatan sumber daya secara optimal.

2. Hasil riset belum sepenuhnya menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan

Hasil-hasil riset yang telah dihasilkan oleh lembaga riset belum secara optimal dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan di Kota Pekalongan. Orientasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih mengedepankan target kinerja jangka pendek dan pendanaan seringkali menghambat implementasi program-program jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan komitmen bersama dalam menjadikan hasil riset sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan kota

3. Kemitraan dalam proses perencanaan pembangunan

Kemitraan dengan berbagai pihak yang kompeten dan peduli terhadap pembangunan daerah sangatlah penting untuk menciptakan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemitraan ini tidak hanya mendorong terciptanya pembangunan yang lebih efektif dan efisien, tetapi juga membangun kepercayaan sosial dan rasa memiliki bersama terhadap hasil pembangunan.

4. Perluasan tuntutan partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah

Dinamika demokratisasi yang terus berlangsung menuntut peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan. Namun, tantangan utama terletak pada pengembangan metode dan mekanisme partisipasi yang efektif dan terarah, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Adanya budaya patriarki yang masih kuat menjadi salah satu kendala yang perlu diatasi untuk mewujudkan partisipasi yang inklusif.

5. Pluralitas aspirasi dan kebutuhan masyarakat

Penyelarasan kebijakan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki masih diperlukan. Dalam masyarakat yang heterogen dengan berbagai kebutuhan dan aspirasi, keputusan memilih suatu keputusan akan menjadi hal yang tidak mudah,

tetapi secara tak terhindarkan harus dilakukan. Karena itu, kebutuhan untuk mengembangkan pola dan sistem yang pengambilan keputusan jelas dan terukur untuk menentukan pemihakan dan pilihan aspirasi segmen masyarakat akan menjadi salah satu isu strategik yang dihadapi institusi perencanaan.

6. Perubahan regulasi yang berpengaruh terhadap kebijakan daerah

Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); sedikit banyak mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran di daerah.

7. Belum optimalnya basis data sebagai bahan penyusunan perencanaan

Perencanaan pembangunan yang efektif sangat bergantung pada ketersediaan basis data terpadu yang komprehensif dan akurat. Kota Pekalongan telah memiliki basis data terpadu yang mengintegrasikan data dari berbagai sektor, seperti ekonomi, sumber daya, sosial, budaya, dan kewilayahan. Namun demikian efektivitas basis data terpadu masih perlu dioptimalkan lagi.

Permasalahan spesifik yang dihadapi adalah belum optimalnya penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.

Dalam setiap pengambilan kebijakan sangat diperlukan adanya data dan informasi yang valid, akurat dan *up to date*, sehingga dalam suatu proses akan mudah untuk mengidentifikasi suatu masalah. Dengan keakuratan data dan informasi yang terus menerus diharapkan akan menghasilkan suatu *output* yang tepat. Kurang validnya data dan informasi sering mengakibatkan pengambilan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Adapun permasalahan lain yang ada di Bappeda dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi, antara lain :

1. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, pemerintahan, sosial dan budaya, sarana dan prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang sinergis dan terintegrasi

Kebutuhan dokumen perencanaan pendukung masih sangat dibutuhkan dalam upaya penyusunan dokumen perencanaan pemerintahan yang tepat dan terukur. Dokumen tersebut baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun panjang. Selain itu karena faktor keterbatasan jumlah personil perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan pembangunan daerah.

2. Belum efektifnya sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang dikarenakan kurang spesifiknya indikator kinerja, sehingga evaluasi kinerja dan pelaporan yang belum konsisten. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) diharapkan Monitoring dan Evaluasi dapat lebih efektif.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan, diantaranya adalah:

1. Inovasi dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tuntutan masyarakat yang semakin kritis serta tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
2. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi dalam RPJMD 2021-2026.
4. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan melibatkan masyarakat dengan fasilitasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

**Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Pekalongan**

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	CATATAN PENTING
	BAPPEDA				9.282.312.000	BAPPEDA				6.843.290.000	
	PERENCANAAN				8.049.867.000	PERENCANAAN				6.324.854.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	6.517.344.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	5.418.748.000	Penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		
			Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100 persen				Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	326.142.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	19.916.000	Penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	CATATAN PENTING
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	10.576.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	6.972.000	Penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.623.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.394.000	Penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	313.943.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	11.550.000	Penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	5.624.180.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.811.585.000	Penyesuaian dengan kebutuhan gaji ASN
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	5.580.844.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.774.293.000	Penyesuaian dengan kebutuhan gaji ASN
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	41.860.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	36.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	CATATAN PENTING
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.476.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.292.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	8.510.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	5.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	8.510.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	5.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	327.303.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	287.256.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.338.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.120.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	CATATAN PENTING
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	58.370.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.500.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.677.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.400.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	48.191.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	48.536.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13.387.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.990.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.544.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.340.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	CATATAN PENTING
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200.796.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	184.370.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	153.334.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	168.421.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.343.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	990.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66.002.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.989.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	92.431.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	CATATAN PENTING
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	77.875.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	126.570.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	57.720.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	107.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	20.155.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	19.570.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen	769.719.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen	421.464.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
			Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100 persen				Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100 persen		
			Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100 persen				Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100 persen		

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	CATATAN PENTING
7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen	651.184.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen	361.259.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
20	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	651.184.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	361.259.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
8	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen	106.532.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen	15.050.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
21	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	106.532.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	15.050.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen	12.003.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen	45.155.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	CATATAN PENTING
22	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	12.003.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	45.155.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100 persen	762.804.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100 persen	484.642.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100 persen				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100 persen		
			Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100 persen				Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100 persen		
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Pekalongan	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100 persen	196.592.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Pekalongan	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100 persen	135.160.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
23	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	8.567.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	14.965.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	CATATAN PENTING
	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					
24	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	68.541.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	33.500.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
25	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	25.701.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	14.965.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
26	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	93.783.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	71.730.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	CATATAN PENTING
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Pekalongan	Persentase kegiatan Fasilitas dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 persen	163.110.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Pekalongan	Persentase kegiatan Fasilitas dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 persen	135.030.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
27	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	163.110.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	135.030.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	403.102.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	214.452.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
28	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	197.072.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	154.210.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	206.030.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	60.242.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	CATATAN PENTING
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.232.445.000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				518.436.000	
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen	1.232.445.000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen	518.436.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100 persen				Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100 persen		
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	74 Indeks				Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	74 Indeks		
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Pekalongan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100 persen	252.582.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Pekalongan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100 persen	234.598.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
30	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 Laporan	175.573.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 Laporan	171.760.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	CATATAN PENTING
31	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kota Pekalongan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	77.009.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kota Pekalongan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	62.838.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100 persen	295.859.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100 persen	111.321.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
32	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 dokumen	295.859.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen	111.321.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
15	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100 persen	684.004.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100 persen	172.517.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah
33	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 dokumen	659.004.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	164.117.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2025	CATATAN PENTING
34	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	25.000.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	8.400.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan keuangan daerah

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terlebih dahulu telah dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kota. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Usulan awal program, kegiatan dan sub kegiatan dari perangkat daerah kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang, baik musrenbang kelurahan maupun kecamatan dan kota, serta forum perangkat daerah. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Wali Kota sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran, maka semua usulan masyarakat yang masuk sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Usulan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah disesuaikan dan telah mengakomodir semua usulan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Pada proses Rancangan Awal Renja, belum ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana kerja (renja) perangkat daerah disusun sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Sedangkan RKPD disusun dengan menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Renja Bappeda tahun 2025 sesuai dengan RKPD 2025, yang merupakan penjabaran atas RPJMD 2021-2026.

Selain berpedoman pada RPJMD 2021-2026, RKPD tahun 2025, Renja Bappeda Tahun 2025 juga berpedoman pada RKP Tahun 2025, dengan penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan pembangunan Kota Pekalongan. Adapun Tema RKP Tahun 2025: "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan prioritas nasional disajikan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel. 3.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
1	PN1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
2	PN2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan		
3	PN3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
		8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
			kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4	PN4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
		3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
		5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus
5	PN5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
6	PN6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
		4	Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing
7	PN7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
8	PN8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Sesuai RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 ditujukan untuk "Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Dengan Dipayungi Nilai-nilai Religiusitas". Adapun Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2025. Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah ini :

Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal		
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat,	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh,

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
	bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata		guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
		2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
		3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
		4	Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing
		5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus
3	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
		12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi <i>reward and punishment</i>

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2025 berpedoman dan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota periode 2021-2026 yang arah kebijakannya sesuai dengan RPJMD 2021-2026. Selain itu Rencana Strategis Bappeda yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja juga sudah disusun untuk jangka waktu 2021-2026. Sehubungan hal tersebut, maka penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengacu pada RPJMD 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025 dan didasarkan pada Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Lima Tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Arah kebijakan makro selanjutnya dirumuskan menjadi sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai, selanjutnya dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran perangkat daerah, sehingga terwujud keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antar waktu dan antar lembaga. Dalam kaitannya dengan penetapan prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan tema pembangunan Tahun 2025, maka kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah mendukung secara langsung dalam prioritas daerah yang pertama, yaitu Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel serta terjaganya kondusivitas wilayah.

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi semua bidang dan sekretariat di Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, renja ini dimaksudkan sebagai bahan untuk mengevaluasi diri dalam meningkatkan kinerja BAPPEDA.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025, serta isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan yang ditetapkan adalah ***meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah, serta meningkatkan kualitas kelitbang untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan meningkatnya rekomendasi hasil litbang***, sehingga BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dituntut untuk menghasilkan produk produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif yang efektif dan efisien.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh BAPPEDA dengan dukungan perangkat daerah lain serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di BAPPEDA antara lain terhadap:

1. Pencapaian prioritas dan sasaran daerah;
2. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah; dan
3. Sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kaitannya dengan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan, pada tahun 2025, BAPPEDA Kota Pekalongan merencanakan akan mencapainya dengan melaksanakan 4 Program yang terdiri 15 kegiatan dengan 34 sub kegiatan dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Pekalongan.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025, tercantum dalam tabel 3.3. sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2025
Dan Perkiraan Maju Tahun 2026**

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		BAPPEDA Kota Pekalongan				6.843.290.000				9.392.179.000
	5.01	PERENCANAAN				6.324.854.000				8.139.035.000
1	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Kota Pekalongan	100 persen	5.418.748.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	6.725.961.000
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pekalongan	100 persen				100 persen	
			Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Kota Pekalongan	100 persen				100 persen	
1	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	19.916.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	320.211.000
1	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	3 dokumen	6.972.000	APBD Kota Pekalongan	-	3 dokumen	2.716.000
2	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	2 dokumen	1.394.000	APBD Kota Pekalongan	-	2 dokumen	1.630.000
3	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	15 Laporan	11.550.000	APBD Kota Pekalongan	-	15 Laporan	315.865.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	4.811.585.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	5.827.228.000
4	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	32 Orang/bulan	4.774.293.000	APBD Kota Pekalongan	-	32 Orang/bulan	5.784.450.000
5	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	12 dokumen	36.000.000	APBD Kota Pekalongan	-	12 dokumen	41.321.000
6	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	1 Laporan	1.292.000	APBD Kota Pekalongan	-	1 Laporan	1.457.000
3	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	100 persen	5.000.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	8.639.000
7	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	1 Paket	5.000.000	APBD Kota Pekalongan	-	2 Paket	8.639.000
4	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	100 persen	287.256.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	332.253.000
8	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	2.120.000	APBD Kota Pekalongan	-	4 Paket	1.359.000
9	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	36.500.000	APBD Kota Pekalongan	-	4 Paket	59.254.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
10	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	2.400.000	APBD Kota Pekalongan	-	4 Paket	2.717.000
11	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	48.536.000	APBD Kota Pekalongan	-	4 Paket	48.920.000
12	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan	13 Paket	10.990.000	APBD Kota Pekalongan	-	2 Paket	13.589.000
13	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan	2 dokumen	2.340.000	APBD Kota Pekalongan	-	2 dokumen	2.582.000
14	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	200 Laporan	184.370.000	APBD Kota Pekalongan	-	200 Laporan	203.832.000
5	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	100 persen	168.421.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	157.932.000
15	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	4 Laporan	990.000	APBD Kota Pekalongan	-	4 Laporan	1.363.000
16	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan	12 Laporan	75.000.000	APBD Kota Pekalongan	-	12 Laporan	67.000.000
17	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	12 Laporan	92.431.000	APBD Kota Pekalongan	-	12 Laporan	89.569.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
6	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan	100 persen	126.570.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	79.698.000
18	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan	15 Unit	107.000.000	APBD Kota Pekalongan	-	14 Unit	59.238.000
19	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan	41 Unit	19.570.000	APBD Kota Pekalongan	-	41 Unit	20.460.000
II	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	Kota Pekalongan	100 persen	421.464.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	620.952.000
			Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	Kota Pekalongan	100 persen				100 persen	
			Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Kota Pekalongan	100 persen				100 persen	
7	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	Kota Pekalongan	100 persen	361.259.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	498.531.000
20	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Pekalongan	5 Dokumen	361.259.000	APBD Kota Pekalongan	-	5 Dokumen	498.531.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
8	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	Kota Pekalongan	100 persen	15.050.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	109.690.000
21	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Pekalongan	1 Dokumen	15.050.000	APBD Kota Pekalongan	-	1 Dokumen	109.690.000
9	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Kota Pekalongan	100 persen	45.155.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	12.731.000
22	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Pekalongan	8 Laporan	45.155.000	APBD Kota Pekalongan	-	8 Laporan	12.731.000
III	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	Kota Pekalongan	100 persen	484.642.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	792.122.000
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	Kota Pekalongan	100 persen				100 persen	
			Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	Kota Pekalongan	100 persen				100 persen	
10	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	100 persen	135.160.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	216.705.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
23	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Pekalongan	1 Laporan	14.965.000	APBD Kota Pekalongan	-	1 Laporan	8.727.000
24	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kota Pekalongan	1 Laporan	33.500.000	APBD Kota Pekalongan	-	1 Laporan	76.798.000
25	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Pekalongan	1 Laporan	14.965.000	APBD Kota Pekalongan	-	1 Laporan	26.181.000
26	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Pekalongan	1 Laporan	71.730.000	APBD Kota Pekalongan	-	1 Laporan	104.999.000
11	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	Kota Pekalongan	100 persen	135.030.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	166.220.000
27	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kota Pekalongan	1 Laporan	135.030.000	APBD Kota Pekalongan	-	1 Laporan	166.220.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
12	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Pekalongan	100 persen	214.452.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	409.197.000
28	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kota Pekalongan	2 Laporan	154.210.000	APBD Kota Pekalongan	-	2 Laporan	200.052.000
29	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kota Pekalongan	2 Laporan	60.242.000	APBD Kota Pekalongan	-	2 Laporan	209.145.000
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				518.436.000				1.253.144.000
IV	5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	Kota Pekalongan	100 persen	518.436.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	1.253.144.000
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	Kota Pekalongan	100 persen				100 persen	
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	Kota Pekalongan	75 Indeks			Skor RiDA diganti menjadi IDSD sehingga perlu disesuaikan	74 Indeks	
13	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	Kota Pekalongan	100 persen	234.598.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	257.175.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2025				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2025	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
30	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Pekalongan	5 Laporan	171.760.000	APBD Kota Pekalongan	-	5 Laporan	178.228.000
31	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kota Pekalongan	1 Laporan	62.838.000	APBD Kota Pekalongan	-	1 Laporan	78.947.000
14	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Kota Pekalongan	100 persen	111.321.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	301.622.000
32	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Pekalongan	2 dokumen	111.321.000	APBD Kota Pekalongan	-	2 dokumen	301.622.000
15	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	Kota Pekalongan	100 persen	172.517.000	APBD Kota Pekalongan	-	100 persen	694.347.000
33	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Pekalongan	2 dokumen	164.117.000	APBD Kota Pekalongan	-	2 dokumen	694.347.000
34	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Pekalongan	1 Laporan	8.400.000	APBD Kota Pekalongan	-	1 Laporan	-

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bappeda Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025. Rencana kerja Bappeda Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Bappeda 2021-2026, mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi. Program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang sudah ada dalam SIPD, sehingga ketercapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BAPPEDA	6.843.290.000		
A	Urusan Perencanaan Pembangunan	6.324.854.000		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.418.748.000	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
			Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
1	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.916.000	Persentase ketersediaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.972.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.394.000	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.550.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.811.585.000	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.774.293.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	PelaksanaanPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	36.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	1.292.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.256.000	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.120.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
9	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	36.500.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
11	Penyediaan BahanLogistik Kantor	48.536.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.990.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.340.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.370.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan
5	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	168.421.000	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.431.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.570.000	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan	107.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
24	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	33.500.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan
25	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.965.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
26	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	71.730.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA (Sumber Daya Alam)	135.030.000	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 persen
27	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	135.030.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	214.452.000	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100 persen
28	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	154.210.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	60.242.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah	2 Laporan
B	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	518.436.000		
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	518.436.000	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100 persen
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	74 Indeks
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	234.598.000	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100 persen
30	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	171.760.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 Laporan
31	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	62.838.000	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	111.321.000	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100 persen
32	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	111.321.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 dokumen
15	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	172.517.000	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100 persen
33	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	164.117.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 dokumen
34	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	8.400.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Dari tabel 4.1 tersebut diatas dapat dilihat bahwa rencana kerja pada tahun 2025 Bappeda Kota Pekalongan melaksanakan 2 (dua) Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, kedua urusan tersebut dituangkan ke dalam 4 (empat) Program, 15 (lima belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Rancangan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun berdasarkan pada dokumen perencanaan jangka menengah RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026, dan RENSTRA Bappeda 2021-2026 serta dokumen perencanaan tahunan RKPD Kota Pekalongan tahun 2025. Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, analisis kebutuhan, dan usulan dari para pemangku kepentingan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025 memuat 2 unsur penunjang urusan pemerintahan, yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan, yang terdiri dari 4 program 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.843.290.000,- (enam milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Substansi Renja Bappeda disusun dengan berpedoman Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

5.1 CATATAN PENTING

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Keterlibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang dan forum perangkat daerah.

5.2 KAJIDAH PELAKSANAAN

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku yang berkepentingan dalam pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang tetap harus dikedepankan.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Substansi Renja Bappeda disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Bappeda Kota Pekalongan atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Bappeda, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang pada Bappeda, agar segera menyusun rencana kerja anggaran (RKA) masing masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan, mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan oleh masing masing bidang atau bagian. Dengan demikian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Kami berharap, bahwa Renja Bappeda ini dapat mengakomodir seluruh target indikator kinerja untuk urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Pekalongan, 1 Agustus 2024

Kepala Bappeda Kota Pekalongan



CAYEKTI WIDIGDO, AP.,MSI

Pembina Utama Muda

NIR 19760729 199412 1 001

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.570.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	421.464.000	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen
			Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100 persen
			Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	8 Laporan
7	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	361.259.000	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen
20	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	361.259.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen
8	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	15.050.000	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen
21	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15.050.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen
9	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	45.155.000	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen
22	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	45.155.000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	484.642.000	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100 persen
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100 persen
			Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100 persen
10	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	135.160.000	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100 persen
23	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	14.965.000	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Laporan